

Inggris-Maroko Ingin Bangun Terowongan Penghubung Eropa dan Afrika

LONDON(IM) - Inggris dan Maroko sedang mempertimbangkan rencana menghidupkan kembali proyek yang telah berusia puluhan tahun untuk terowongan penghubung Eropa dan Afrika.

Terowongan itu dirancang menghubungkan Teritori Seberang Laut Britania di Gibraltar ke kota Tangier di Maroko utara.

Proyek tersebut muncul kembali pasca-Brexit karena kabinet Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson mencari peluang dan hubungan perdagangan baru.

"London telah dengan serius memulai perjalanan proyek yang akan menghubungkan Eropa ke Afrika," ungkap laporan Arab Weekly.

Dalam wawancara dengan Spanyol tahun lalu, mantan Duta Besar Inggris di Rabat, Thomas Riley, mengatakan ada banyak peluang untuk mengembangkan hubungan antara Maroko dan Gibraltar.

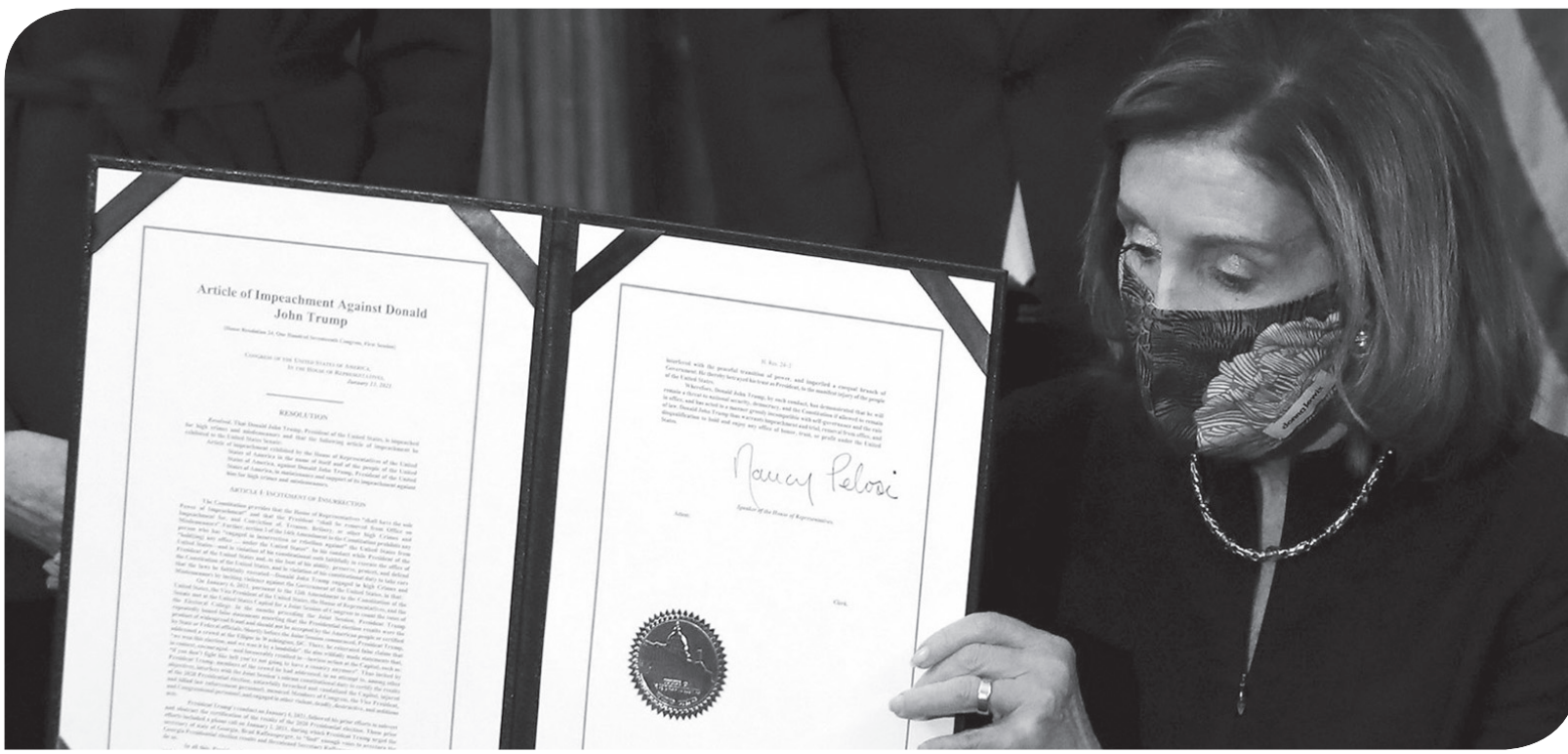
Terowongan sepanjang

30 kilometer itu bisa jadi mirip dengan Eurotunnel yang menghubungkan Inggris ke Prancis.

Jika rencana tersebut berjalan, ini akan mengganti proyek terowongan Spanyol-Maroko yang dibicarakan selama hampir 40 tahun, meski proposal pertama telah diajukan sejak akhir 1800-an. Namun, pembicaraan antara Spanyol dan Maroko berakhir dua tahun lalu karena banjir dan gempa bumi yang sering terjadi di daerah tersebut. Proyek tersebut lantas dianggap tidak dapat dijalankan lagi.

Hubungan antara London dan Rabat telah menguat dalam beberapa tahun terakhir dengan dialog strategis pertama antara kedua negara yang terjadi dua tahun lalu.

Pada November, pejabat militer senior dari kedua negara membahas penguatan hubungan pertahanan setelah pertemuan tentang situasi keamanan di kawasan Mediterania dan Sahel. ● **gul**



PASAL PEMAKZULAN TERHADAP PRESIDEN TRUMP

Ketua DPR AS Nancy Pelosi (D-CA) menunjukkan pasal pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump setelah menandatangani dalam upacara keasyikan, di Capitol AS di Washington, Rabu (13/1).

Trump Jadi Presiden AS Pertama yang Dimakzulkan Dua Kali

Donald Trump didakwa telah menghasut pemberontakan. Dalam pengepungan massa memetakan terhadap gedung Capitol pekan lalu.

WASHINGTON(IM) - Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat (AS) pertama yang dimakzulkan dua kali. Trump didakwa telah menghasut pemberontakan dalam pengepungan massa memetakan terhadap Gedung Capitol pekan lalu.

Dalam pemungutan suara di DPR, yang diamankan oleh pasukan Garda Nasional bersenjata di dalam dan luar, 232 legislator mendukung dakwaan tersebut berbanding 197. Proses persidangan berjalan secepat kilat, dengan anggota parlemen memberikan suara hanya satu minggu setelah loyalis pro-Trump yang kejam menyerbu Capitol AS, didorong oleh seruan presiden bagi mereka untuk "berjuang mati-matian" melawan hasil pemilu.

Setidaknya 10 legislator dari Partai Republik "membelot" dan memberikan suara dukungan untuk pemakzulan Trump.

"Saya tidak memilih pihak, saya memilih kebenaran," kata Jamie Herrera Beutler dari Partai Republik saat mengumumkan dukungannya untuk pemakzulan, yang mendapat tepuk tangan dari Partai Demokrat.

"Itu satu-satunya cara untuk mengalihkan rasa takut," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (14/1).

Meski begitu, sejumlah politisi Partai Republik yang menolak pemakzulan menilai itu adalah keputusan terburu-buru yang melewati proses musyawarah seperti dengar pendapat dan meminta Partai Demokrat untuk meninggalkan upaya tersebut demi persatuan dan pemulihan nasional.

"Memberitakan kepada presiden dalam kerangka waktu sesingkat itu akan menjadi kesalahan," kata Kevin McCarthy, tokoh Partai Republik di DPR.

"Bukan berarti presiden bebas dari kesalahan. Presiden memikul tanggung jawab atas serangan hari Rabu di Kongres oleh massa perusuh," ia menambahkan.

Sekutu terdekat Trump, seperti Jim Jordan, melangkah lebih jauh dengan menuduh Partai Demokrat bertindak ceroboh karena kepentingan politik murni.

"Ini tentang mendapatkan presiden Amerika Serikat," kata Jordan, yang menerima Presidential Medal of Freedom dari Trump dalam upacara pribadi

Gedung Putih minggu ini.

"Itu selalu tentang mendapatkan presiden, apa pun yang terjadi. Itu adalah obsesi," tudingnya.

Di bawah Konstitusi AS, pemakzulan di DPR akan memicu persidangan di Senat. Dibutuhkan suara mayoritas dua pertiga untuk mengukuhkan dan memberhentikan Trump, yang berarti setidaknya 17 politisi Partai Republik di kamar beranggotakan 100 orang harus bergabung dengan Partai Demokrat.

Pemimpin mayoritas Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell mengatakan, tidak ada persidangan yang bisa dimulai sampai Senat dijadwalkan kembali dalam sesi reguler pada 19 Januari mendatang atau satu hari sebelum pelantikan Joe Biden. Sidang akan dilanjutkan di Senat bahkan setelah Trump meninggalkan jabatannya.

Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer, yang akan menjadi pemimpin mayoritas akhir bulan ini, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tidak peduli waktunya, akan ada pengadilan pemakzulan di Senat Amerika Serikat.

"Akan ada pemungutan suara untuk menghukum presiden atas kejahatan dan pelanggaran ringan, dan jika presiden terbukti bersalah, akan ada pemungutan suara untuk melarung dia mencalonkan diri lagi," ujarnya.

Sementara itu, Trump mendesak para pengikutnya

untuk tetap damai.

"Saya mendesak bahwa tidak boleh ada kekerasan, tidak ada pelanggaran hukum dan tidak ada vandalisme dalam bentuk apa pun. Bukan itu yang saya perjuangkan, dan bukan pula yang diperjuangkan Amerika," katanya.

Pemakzulan adalah upaya hukum yang dibuat oleh para pendiri Amerika abad ke-18 untuk memungkinkannya Kongres mencopot seorang presiden yang, menurut Konstitusi, telah melakukan pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan dan pelanggaran ringan lainnya. Jika Trump dicopot sebelum 20 Januari, Wakil Presiden Mike Pence akan menjadi presiden dan menjalani masa jabatannya.

DPR memakzulkan Trump setelah dia mengabaikan seruan pengunduran diri dan Pence menolak tuntutan Partai Demokrat yang meminta ketentuan konstitusional untuk menggulingkan presiden.

DPR sebelumnya memilih untuk mendakwa Trump pada Desember 2019 atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi penyelidikan Kongres atas permintaannya kepada Ukraina agar menyelidiki Joe Biden dan putranya Hunter menjelang pemilu. Partai Demokrat menuduhnya telah meminta campur tangan asing untuk mencoreng pesaing politiknya. Namun pada bulan Februari 2020, Senat AS memilih untuk

menolak pemakzulan Trump.

Sementara itu, preisdenn Donald Trump merilis video pada Rabu (13/1) malam waktu setempat pasca DPR Amerika Serikat (AS) memutuskan memakzulkannya untuk kedua kali. Dalam pesannya, Trump mengimbau agar dukungannya tetap tenang dengan mengatakan bahwa pendukung sejatinya tidak akan melakukan kekerasan politik.

"Kekerasan massa bertentangan dengan semua yang saya yakini dan semua yang diperjuangkan oleh gerakan kami," kata Trump dalam pesannya dari Oval Office.

"Tidak ada pendukung sejati saya yang bisa mendukung kekerasan politik," imbuhnya.

"Tidak ada pendukung sejati saya yang dapat memerahkan penegakan hukum atau bendera Amerika kami yang besar. Tidak ada pendukung sejati saya yang dapat mengancam atau melecehkan sesama orang Amerika. Jika Anda melakukan salah satu dari hal-hal ini, Anda tidak mendukung gerakan kami. Anda menyerang negara kami. Kami tidak bisa mentoleransi," tegasnya seperti dikutip dari Fox News, Kamis (14/1).

Pernyataannya diposting akun Twitter Gedung Putih hanya beberapa jam setelah 10 anggota Partai Republik bergabung dengan Partai Demokrat dalam memakzulkan presiden. ● **tom**

Mantan Menlu Ethiopia Tewas dalam Penumpasan Pemberontak di Tigray

ADDIS ABABA(IM) - Mantan Menteri Luar Negeri Ethiopia Seyoum Mesfin termasuk di antara tiga pemimpin yang tewas oleh pasukan pemerintah dalam tindakan keras yang sedang berlangsung di wilayah utara Tigray, yang dituduh oleh pihak berwenang di Addis Ababa sebagai pemberontakan.

"Seyoum, Abay Tschaye, Asmelash Woldeleselassie dan Kolonel Kiros Hagos tewas dalam baku tembak yang dilakukan dengan keamanan pribadi kelompok kriminal setelah menolak untuk menyerah kepada militer Ethiopia," cuit pusat krisis pemerintah Ethiopia.

"Lima pejabat kunci dari Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) ditangkap dalam operasi yang sama," kata pemerintah seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (14/1).

Selama akhir pekan, pemerintah Perdana Menteri Abiy Ahmed mengatakan telah membunuh 15 anggota TPLF dan menangkap delapan lainnya, sementara salah satu pendiri partai, Sebat Nega, dilaporkan ditangkap pada pekan lalu.

Seyoum adalah menteri luar negeri pertama Ethiopia, setelah Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) ditangkap dalam operasi yang sama, kata pemerintah seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (14/1).

Selama akhir pekan, pemerintah Perdana Menteri Abiy Ahmed mengatakan telah membunuh 15 anggota TPLF dan menangkap delapan lainnya, sementara salah satu pendiri partai, Sebat Nega, dilaporkan ditangkap pada pekan lalu.

Seyoum adalah menteri luar negeri pertama Ethiopia, setelah Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) ditangkap dalam operasi yang sama, kata pemerintah seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (14/1).

berinya kekuasaan ekstensif untuk menindak kegiatan ilegal yang mengancam tatanan konstitusional. Dia menuduh pemerintah daerah menyerang pangkalan militer, yang dibantah TPLF.

Pada tanggal 23 November, pemerintah Abiy mengatakan bahwa pasukannya telah mengepung Ibu Kota regional Mekelle dengan pasukan dan tank, dan memberi waktu 72 jam kepada "pemberontak" untuk menyerah.

"Siapa pun yang memilih untuk tetap tinggal di kota setelah tenggat waktu berakhir akan ditunjukkan tanpa ampun," kata para pemimpin militer kepada media lokal.

Sementara itu, Perdana Menteri men-tweet bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat Tigray adalah yang terpenting bagi pemerintah Federal, "yang akan melakukan semua yang diperlukan untuk memastikan stabilitas berlaku dan bahwa warga negara kita ingin bebas dari bahaya," katanya.

Media luar, organisasi kemanusiaan atau pengamat luar belum diizinkan masuk ke wilayah tersebut, dan saluran telepon dan internet telah terputus selama berbulan-bulan sekarang.

Tigrayans telah menolak untuk bergeser sama dengan pemerintah pusat sejak 2018, ketika Abiy - seorang perwira intelijen dan etnis Oromo dari Ethiopia tengah - menjadi perdana menteri. Mereka mengklaim pemerintah baru memilih mereka untuk penganiayaan politik dan pembersihan.

TPLF adalah salah satu faksi utama di Front Demokrasi Revolusioner Rakyat Ethiopia (EPRDF), yang menggulingkan Mengistu. Pemimpinnya, Meles Zenawi, adalah presiden pertama Ethiopia dan kemudian menjadi Perdana Menteri, yang berkuasa sampai kematiannya pada tahun 2012. ● **gul**

Pemimpin FBI dan Departemen Kehakiman AS Hilang dari Publik

WASHINGTON(IM) - Pemimpin tertinggi Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) dan badan investigasi FBI tidak muncul dalam konferensi pers (kopers) mengenai penyerbuan ke Capitol Hill. Sebagian besar pemimpin-pemimpin penegak hukum AS adalah loyalis Donald Trump.

Direktur FBI Chis Wray dan pelaksana tugas Jaksa Agung Jeff Rosen tidak muncul dalam konferensi pers gabungan mengenai penyerangan pendukung Trump ke Gedung Kongres pekan lalu.

Mereka juga tidak menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kasus-kasus yang diselidiki dalam peristiwa yang menewaskan lima orang itu. Hilangnya mereka dari hadapan publik cukup mengejutkan mengingat banjirnya serangan dan perhatian pada penegak hukum dalam penyerbuan tersebut. Karena Wray dan Rosen tidak muncul maka tidak ada pejabat tinggi yang menjawab pertanyaan wartawan atau memastikan keamanan pada publik.

Pemimpin FBI dan Departemen Kehakiman diharapkan lebih sering naik podium di masa-masa yang lebih konvensional. Namun

sejumlah mantan pejabat mengatakan mereka bersimpati pada Wray dan Rosen mengingat perilaku presiden yang berubah-ubah dan dakwaan khusus yang bermuatan politis. "Jika sekarang saya berada di posisi Jeff Rosen, saya tidak akan berpikir bagaimana caranya saya tampil tapi bagaimana cara bisa bekerja dengan efektif dan menyerahkan berkas-berkas tuntutan ke pemerintahan selanjutnya," kata mantan jaksa agung pemerintahan Bill Clinton, Stuart Gerson, Kamis (14/1).

Rosen dan Wray dikenal tidak banyak tampil di hadapan publik dan mereka bisa lebih terlihat dalam beberapa hari atau pekan ke depan. Namun saat ini wajah Departemen Kehakiman AS diwakili pelaksana tugas Jaksa Agung Washington, Michael Sherwin sementara FBI diwakili kepala operasi lapangan Washington, Steven D'Antuono. Selasa (12/1) lalu tidak ada yang mendampingi mereka dalam konferensi pers untuk mengumumkan pembentukan gugus tugas yang menyelidiki dakwaan penghasutan. Dalam konferensi pers itu, mereka juga yang memperingatkan ancaman potensi kekerasan.

Pejabat yang mengawasi langsung sebuah penyelidikan biasanya menjadi pembicara utama konferensi rutin tapi mereka kerap didampingi petinggi departemen. Hal ini biasa terjadi terutama dalam penyelidikan yang menarik perhatian publik dan peristiwa yang terjadi di Washington. Kondisi itu terjadi pada Rabu (13/1) kemarin. Rosen menyampaikan pidatonya yang berdurasi empat menit melalui rekaman video yang dirilis Departemen Kehakiman pukul 24:01 waktu setempat.

Ia mengatakan penyerbuan tersebut "tidak dapat ditoleransi dan peristiwa yang tragis". Ia berjanji untuk meminta pertanggungjawaban dari para perusuh. Rosen belum pernah berbicara dengan wartawan Departemen Kehakiman sejak diangkat sebagai pelaksana tugas bulan lalu. Juru bicaranya menilai tiga pernyataan atas namanya mengenai kerusuhan di Capitol Hill dan kematian satu orang petugas polisi dalam kejadian tersebut. Juru bicara Departemen Kehakiman Marc Raimondi mengatakan departemennya mengeluarkan informasi dalam jumlah 'signifikan'. ● **ans**



MUSIM DINGIN DI RUSIA

Sepasang kekasih berjalan melewati beberapa burung merpati yang menghangatkan badan pada pipa pemanas yang tertutup pada cuaca dingin di Omsk, Rusia, Rabu (13/1).

Rumah Sakit Hampir Penuh, Inggris Dilaporkan Pindahkan Pasien Covid-19 ke Hotel

LONDON(IM) - Ribuan pasien Covid-19 di Inggris akan dipindahkan dari rumah sakit ke hotel atau dipulangkan ke rumah mereka sendiri. Ini dilakukan untuk menciptakan ruang baru bagi pasien Covid-19 yang membutuhkan perawatan intensif.

Media setempat melaporkan, dalam rencana yang bernama "rumah dan hotel", rumah sakit bersedia untuk mengeluarkan pasien lebih awal dalam skala besar untuk menciptakan kapasitas darurat ekstra.

Langkah itu dilakukan ketika jumlah pasien Covid-19 yang membutuhkan perawatan di rumah sakit melonjak dalam beberapa minggu terakhir. Dalam tujuh hari terakhir, total 389.572 orang dinyatakan positif Covid-19 di Inggris.

Dokumen rencana itu, yang dilihat Guardian, mengungkapkan bahwa National Health Service (NHS) akan meminta panti jompo untuk mulai menerima pasien Covid-19 langsung dari rumah sakit dan tanpa hasil tes negatif baru-baru ini, selama mereka telah diisolasi selama 14 hari dan sudah tidak menunjukkan gejala baru.

"Mereka yang keluar dari rumah sakit lebih awal akan

menerima bantuan dari organisasi sukarela, termasuk St John Ambulance dan Palang Merah Inggris, serta dari personel medis angkatan bersenjata dan staf NHS yang tersedia," bunyi laporan Guardian, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (13/1).

Menteri Kesehatan Inggris, Matt Hancock mengatakan, ada tekanan kuat terhadap NHS dan rumah sakit, dengan terus meningkatnya jumlah pasien secara drastis. "Kami mencari cara yang berbeda untuk meredakan tekanan tersebut," ujarnya.

Ditanya tentang rencana "rumah dan hotel", Hancock mengatakan rencana hanya akan dijalankan jika secara klinis hal itu benar untuk seseorang.

Namun dalam beberapa kasus, orang membutuhkan perawatan penurunan, mereka sebenarnya tidak perlu berada di ranjang rumah sakit," ujarnya.

"Dia mengatakan, bahwa mereka sedang melihat semua opsi, dan rencana tersebut bukanlah proposal konkret dengan cara apa pun.

"Tetapi, itu adalah sesuatu yang kami lihat, karena kami melihat semua kemungkinannya," tukasnya. ● **gul**



HARI PERTAMA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN DI MALAYSIA

Petugas Polisi Diraja Malaysia (PDRM) melakukan pemeriksaan kepada pengendara lalu lintas yang melewati Jalan Chow Kit Kuala Lumpur pada hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), Rabu (13/1). Kebijakan dalam rangka membendung COVID-19 tersebut berlangsung 13 hingga 26 Januari 2021 dengan dukungan pernyataan darurat dari Raja Malaysia.